

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PARIWISATA 2018

PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN:
INOVASI, TEKNOLOGI, DAN KEARIFAN LOKAL

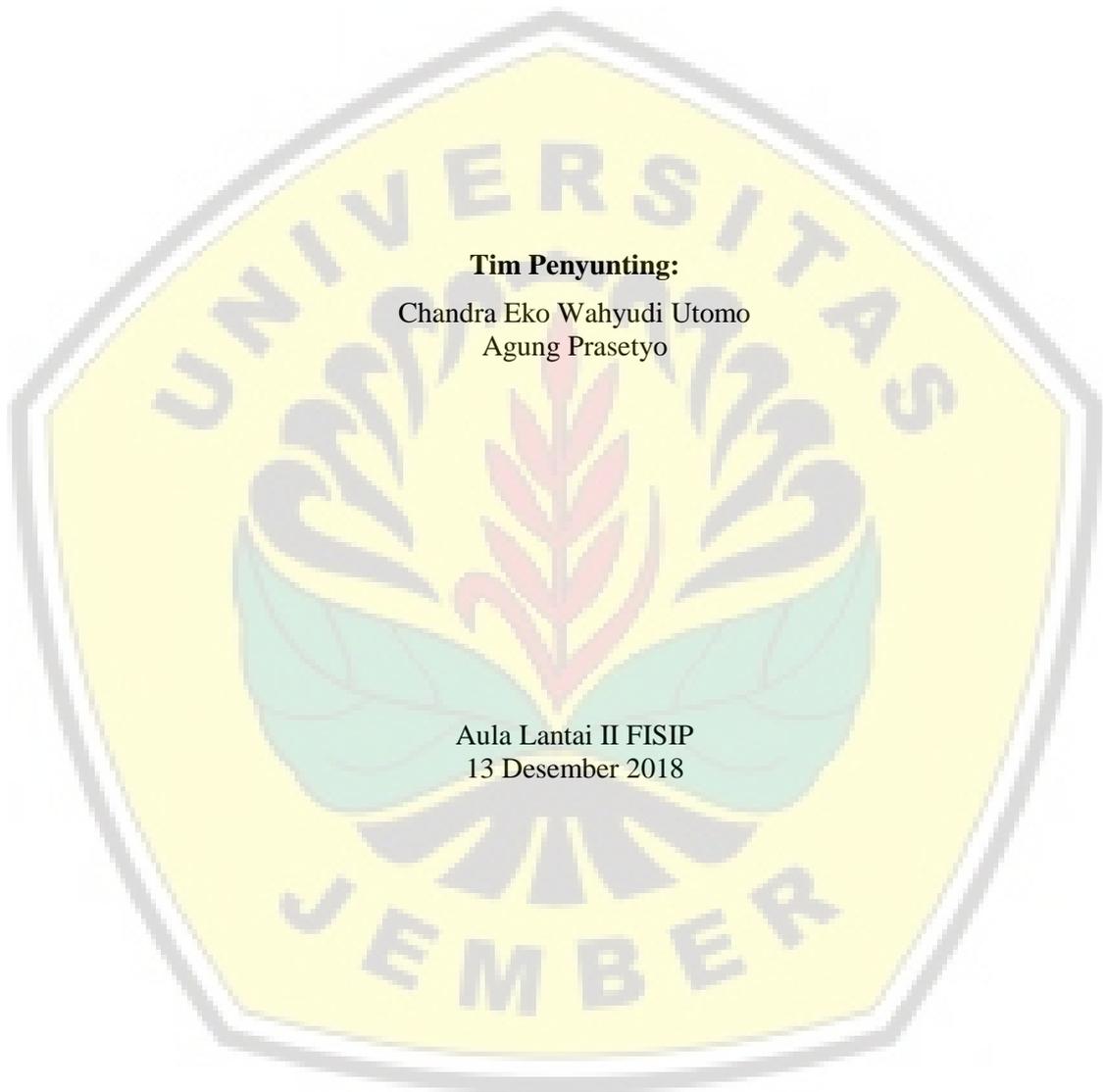
TIM PENYUNTING:
CHANDRA EKO WAHYUDI UTOMO
AGUNG PRASETYO



Diterbitkan Oleh:
Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata
FISIP UNIVERSITAS JEMBER

PROSIDING

**PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN:
INOVASI, TEKNOLOGI DAN KEARIFAN LOKAL**



Tim Penyunting:

Chandra Eko Wahyudi Utomo
Agung Prasetyo

Aula Lantai II FISIP
13 Desember 2018

**UPT PERCETAKAN DAN PENERBIT
UNIVERSITAS JEMBER**

**PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN:
INOVASI, TEKNOLOGI DAN KEARIFAN LOKAL**

Penyunting:

Chandra Eko Wahyudi Utomo

Agung Prasetyo

ISBN : 978-602-5617-

Layout and Design Cover

Sie Dekdok

Hak Cipta @ 2019

Published by:

UPT Penerbitan Universitas Jember

bekerja sama dengan

Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata FISIP

Address Editor:

Jl. Kalimantan 37

Jember 68121

Telp. 0331-330224, Voip. 0319

e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Distributor:

Jember University Press

Jl. Kalimantan, No. 37 Jember

Telp. 0331-330224, Ext. 0319, Fax. 0331-339039

e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

All rights reserved. Except for the quotation of short passage for the purposes of criticism and review, no part of this book may be reproduced in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior permission of the publisher

Kata Pengantar

Dewasa ini pariwisata telah dikembangkan secara besar-besaran untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Pilihan tersebut disebabkan karena pariwisata adalah industri yang unik, yaitu bahwa wisatawan sebagai pelanggan mendatangi produk, sulit diproteksi dan sulit dibatasi oleh kepentingan apapun, mendatangkan devisa serta membuka kesempatan kerja yang luas. Pada tahun 2007 tercatat hampir 1 miliar wisatawan mengunjungi berbagai objek wisata di seluruh penjuru dunia, dengan pengeluaran lebih dari 750 juta US\$, dan menciptakan sekitar 193 juta kesempatan kerja.

Pengembangan pariwisata telah mengalami berbagai proses perubahan yang disebabkan oleh kondisi eksternal maupun internal. Pengalaman di berbagai negara di mana pariwisata dikembangkan secara besar-besaran menunjukkan timbulnya berbagai dampak, seperti menurunnya kualitas kehidupan sosial-budaya dan lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Oleh karenanya muncul tanggapan serius dari berbagai kalangan terhadap pengembangan kepariwisataan dunia. Badan Turisme Dunia (WTO) telah mengarahkan bahwa pengembangan pariwisata dunia harus ditujukan pada *peningkatan kualitas hidup* baik untuk wisatawan, pelaku bisnis wisata, dan masyarakat khususnya yang berada di sekitar lokasi objek wisata.

Pada tatanan global, pariwisata dihadapkan pada berbagai tuntutan, seperti;

- liberalisasi perdagangan yang memicu persaingan global
- standar kualitas profesionalisme
- apresiasi masyarakat dunia terhadap hak asasi manusia
- perlindungan atas hak-hak pelanggan
- pelaksanaan nilai-nilai dalam kode etik pariwisata dunia (*the global code of ethic for tourism*)
- pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab
- meningkatkan kualitas hidup

Berkaitan dengan berbagai tuntutan tersebut, maka diperlukan keterlibatan secara koordinatif dari para *stakeholder* pariwisata dengan mengutamakan prinsip berkelanjutan, memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat setempat secara terpadu.

Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) sekarang dikenal sebagai sebuah pendekatan esensial untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tanpa menghabiskan sumberdaya alam dan budaya atau penurunan kualitas lingkungan. Pada *United Conference on Environment and Development* yang dikenal dengan *Earth Summit* di Rio de Janeiro Juni 1992, menyarankan agar konsep pembangunan berkelanjutan harus menjadi sebuah idiologi di semua aspek pembangunan, termasuk pariwisata. Badan Turisme Dunia atau *World Tourism Organization* (WTO) mengharapkan agar pengembangan industri pariwisata di mana pun harus berpijak dan diselaraskan pada pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan menjadi sebuah komitmen dari masyarakat pariwisata dunia sebagai tanggung jawab dunia pariwisata terhadap kelestarian lingkungan, karena pengembangan pariwisata diharapkan dapat memberi keuntungan substansial bagi masyarakat luas yang meliputi:

- Pekerjaan dan bisnis baru
- Tambahan pendapatan
- Pasar baru untuk produk-produk lokal (cinderamata; makanan; kesenian; keunikan)
- Memperbaiki infrastruktur dan pelayanan serta fasilitas masyarakat
- Alih ilmu, pengetahuan dan teknologi
- Kepedulian dan proteksi terhadap lingkungan
- Pendidikan dan mobilitas sosial
- Menumbuhkan kreativitas

Secara ringkas pengembangan pariwisata harus dapat memberikan dukungan terhadap upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan terhadap kebebasan untuk memilih bidang kehidupan yang dikehendaki dan tumbuhnya kesempatan kerja serta perlindungan dan perbaikan lingkungan.

Salah aspek bahasan yang dapat memberi kontribusi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah Ekowisata yang merupakan salah satu bentuk dari wisata minat khusus (*special interest*). Read (1980) menyatakan bahwa wisata minat khusus merupakan bentuk perjalanan dimana wisatawan mengunjungi suatu destinasi karena memiliki kekhususan yang sesuai dengan minatnya. Ditinjau dari aspek kekhususan kegiatan pariwisata tersebut dapat diasumsikan bahwa bentuk dari wisata minat khusus menekankan pada:

- Motivasi pencarian sesuatu yang unik dan baru untuk memperoleh pengalaman baru, seperti introspeksi serta berkomunikasi dengan kelompok masyarakat lain;
- Motivasi pencarian pada pengalaman wisata yang berkualitas dan yang memiliki nilai pelestarian terhadap sumberdaya yang digunakan;
- Memperluas wawasan dan kreativitas

Konsekuensinya, penyelenggara wisata minat khusus harus dapat menyajikan atraksi yang unik dan berkualitas yang mencakup atraksi itu sendiri maupun sarana pendukung pariwisata lainnya yang berbasis pada prinsip berkelanjutan. Bentuk wisata minat khusus diantaranya wisata peninggalan (*heritage tourism*), wisata alam, dan atau *special event*. Salah satu bentuk dari *special event* adalah seni pertunjukan, yaitu karya dan atau kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi dan dapat ditonton serta dinikmati. Zeppel dan Hall (1992) mengategorikan seni pertunjukan sebagai *heritage tourism*, yaitu bagian dari pariwisata budaya yang menceritakan secara ringkas kepada pengunjung tentang pentingnya motivasi budaya, semacam karya wisata, seni pertunjukan, perjalanan budaya, festival, cerita rakyat dan peristiwa budaya lainnya.

Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, daerah-daerah desa-desa di Nusantara yang memiliki keunikan atau potensi untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata

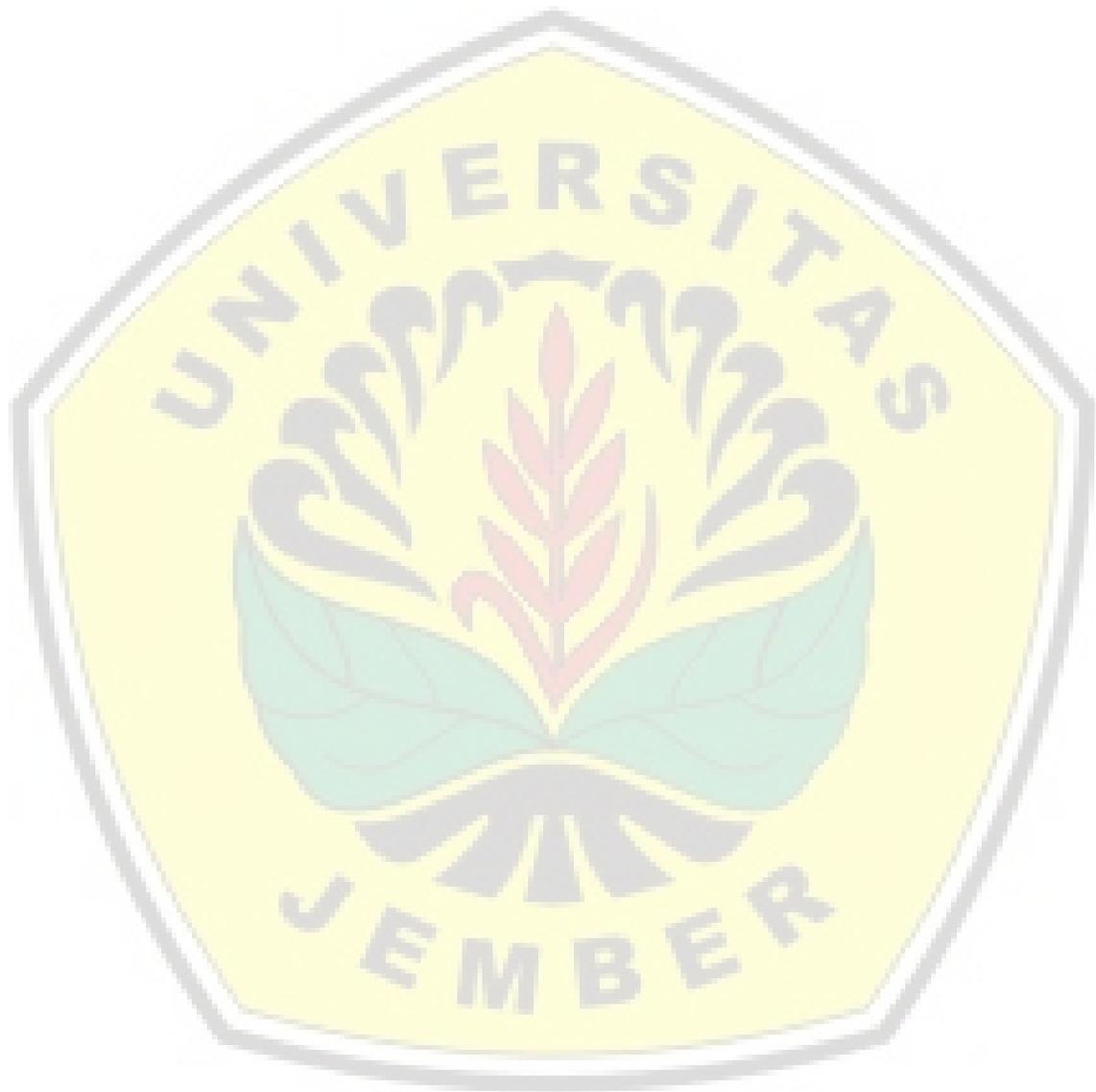
perlu secara aktif menciptakan kegiatan wisata yang mengandung kepedulian terhadap kelangsungan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat setempat. Tujuan-tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau mempertinggi PAD, harus diselaraskan dengan tujuan-tujuan pelestarian, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Seminar Nasional dengan Tema Pengembangan Pariwisata yang Berkaitan: Inovasi, Teknologi dan Kearifan Lokal pada 13 Desember 2018 di FISIP Universitas Jember membahas kepariwisataan dari berbagai aspek, baik yang berbasis pada teoritis maupun praktis. Bahasan yang dihasilkan jika diringkas menghasilkan pemikiran bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan inovasi, kreativitas teknologi, dan kearifan lokal sebagai basis dari pelibatan masyarakat lokal dan pelestarian aset kepariwisataan. Tindakan konkrit yang diperlukan dalam upaya mendukung pelestarian sumber-sumber dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, adalah:

- a. Menghindari penggunaan lahan-lahan pertanian maupun perkebunan produktif dan kawasan konservasi untuk kepentingan pembangunan fasilitas wisata (*hotel; restoran*)
- b. Memanfaatkan lokasi alamiah untuk pengembangan wisata pendidikan pelestarian lingkungan (*alam; budaya; peninggalan; seni dan tradisi masyarakat setempat*)
- c. Memanfaatkan peralatan tradisi dan melibatkan masyarakat setempat (*pakaian; keramahtamahan; perilaku; tungku arang/kayu; interior; dekor kayu*)
- d. Memperkokoh budaya pelayanan—ramah, peduli dan inovatif
- e. Partisipasi aktif terhadap program-program pelestarian lingkungan
- f. Kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya pengelolaan lahan yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan.

Jember, 11 Januari 2019

Tim Prosiding



DAFTAR ISI

Pertunjukan Tari Klasik Tradisional Gaya Yogyakarta sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Keraton Yogyakarta (Adhiningasih Prabhawati, Sri Wahjuni)	1
Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Boom Banyuwangi (Alim Marta Dinata, Anastasia Murdyastuti, Abdul Kholiq Azhari)	19
Strategi Pengembangan Pariwisata Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi (Anastasia Murdyastuti)	35
Proses Kebijakan Kepariwisata Berkelanjutan di Banyuwangi (Edy Wahyudi)	47
Sistem Pariwisata Pedesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Florentinus Nugro Hardianto)	65
Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi (Galih Wicaksono, Yeni Puspita)	77
Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat (I Ketut Mastika)	89
Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013 – 2017 dari Sektor Pariwisata di Banyuwangi (Indra Perdana Wibisono)	101
Pengembangan Potensi Desa Wisata Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Berdasarkan Analisis 4A: <i>Attraction, Accessibility, Amenities</i> dan <i>Ancillary Service</i> (Margaretta Andini Nugroho, Rebecha Prananta)	123
Pengembangan Sumber Daya Manusia secara Prespektif Potensi Wisata Daerah Religi ke Wisata Daerah Berkembang Bukit Pecaron Situbondo Jawa Timur (Mochamad Edoward Ramadhan, Dedi Dwilaksana, Suhartono, Djoko Poernomo)	135
Strategi Penguatan <i>Entrepreneur Marketing</i> pada Industri Tenun Ikat Bandar Kidul di Era Ekonomi Kreatif Indonesia (Novi Haryati, Rokhani, Choiria Anggraini, Moch. Adi Surahman)	147
Pengembangan Komunitas Berbasis Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Desa Wisata (Nur Kholis, Muhammad Ananda Egy)	161
Pengembangan Desa Wisata melalui Pembudidayaan Ikan Nila (Pairan, Muhammad Via Pratama)	173
Pluralisme dan Wisata Alam sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Wisata Kebangsaan Wonorejo Situbondo (Pramesi Lokaprasidha)	191
Pariwisata Berbasis Hutan Mangrove (Purwowibowo, Budhy Santoso)	205

Studi Korelasi Pengembangan Destinasi Wisata Alam Taman Borneo Samarinda dengan Konservasi Lingkungan (Rinto Dwiatmojo, Rini Koen Iswandari)	217
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Pendukung Industri Pariwisata Indonesia (Sri Yuniati, Djoko Susilo)	231
<i>Branding</i> dan Strategi Pemasaran: Perbandingan Beberapa Studi Kasus Pemasaran Daerah Tujuan Wisata (Sunardi Purwaatmoko, Syech Haryono, Adhiningasih Prabhawati)	243
Analisis Distribusi dan Tujuan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (Studi pada Batam, Bali dan DKI Jakarta) (Supriono)	259
Dampak Pengembangan Destinasi Wisata terhadap Pendapatan Masyarakat: Studi Kasus Area Wisata Pulo Merah Kabupaten Banyuwangi (Vistario Febrian Yoseph, Supranoto, Agus Suharsono)	273



PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT

I Ketut Mastika¹
i.ketut.mastika@gmail.com

Abstrak

Ekspansi pengembangan industri pariwisata di Bali berdampak adanya alih fungsi lahan dan minimnya partisipasi masyarakat lokal. Untuk mengangkat peran serta masyarakat lokal, Yayasan Wisnu LSM di bidang lingkungan di Bali berinisiasi membentuk Jaringan Ekowisata Desa (JED) dan melakukan pemberdayaan masyarakat desa agar memiliki kemandirian dalam mengelola potensi ekowisata yang ada di wilayahnya. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali data tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip pengembangan ekowisata berwawasan kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyelenggaraan program-program pemberdayaan sejak tahap *enable*, *empowering* dan *autonomy*, sehingga masyarakat di desa yang menjadi anggota JED mampu mengembangkan ekowisata desa berbasis masyarakat lokal berwawasan kearifan lokal.

Kata Kunci: Ekowisata, Pariwisata Berbasis Masyarakat, Kearifan Lokal.

Abstract

*The expansion of the tourism industry in Bali, have consequences to over the function of the land and the lack of participation of local communities. To raise the role of local communities, foundations of Wisnu the NGOs in the field of environment in Bali, initiate to form a network of ecotourism village (JED) and doing community empowerment in order to have the independent to managing of the ecotourism potential in its territory. In-depth interviews were used to dig up data about values, principles, and practices of development village ecotourism insightful local wisdom. The results showed the existence of organizing programs empowerment since stage *enable*, *empowering*, and *autonomy*, so that people in the village who are members of JED are able to develop community-based village ecotourism insightful local wisdom.*

Keyword: *Ecotourism, Community-Based Tourism, Local Wisdom*

¹ Dosen Universitas Jember

Pendahuluan

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) merupakan agenda penting bagi kalangan penggiat ekowisata. Bentuk wisata alternatif dengan tujuan pelibatan masyarakat lokal adalah ekowisata (*ecotourism*) yang mengelola potensi keaslian budaya dan potensi kelestarian alam sebagai aset pengembangan objek dan atraksi wisata. Segmentasi wisatawan yang menjadi sasaran adalah wisatawan minat khusus (*special interest tourism*) memiliki motif wisata aktif mengunjungi kawasan-kawasan alami dan keunikan budaya lokal. Jenis wisatawan ini sering dikenal dengan “*The REAL Travel*”), yakni: *Rewarding, Enriching, Adventourism*, dan *Learning* (PAU-UGM, 1997). Dalam aktivitas wisata, mereka secara aktif berinteraksi dengan penduduk lokal dalam mewujudkan motif wisatanya.

Berkembangnya konsep dan praktek penyelenggaraan ekowisata sebagai bentuk pariwisata alternatif (antitesa dari *mass tourism*), mengisyaratkan adanya kesadaran dalam masyarakat akan pentingnya mengedepankan bentuk pariwisata bertanggung jawab. Pengembangan pariwisata alternatif tidak saja dimaknai dan dipahami sebagai pengembangan produk berorientasi kepada kepuasan pelanggan (*customers satisfaction*), namun juga penyalarsan produk dan atraksi dengan kelestarian potensi alam dan budaya lokal sebagai aset wisata di kawasan wisata yang dikembangkan. Keberhasilan dalam menciptakan keselarasan motif wisata ini merupakan suatu reputasi bagi pengembangan pariwisata alternatif.

Reputasi dalam konteks penyalarsan motif wisata tersebut, merupakan bagian penting dalam

pengembangan destinasi ekowisata desa. *Brand* ekowisata desa yang terbentuk hendaknya memiliki posisi visual yang lengkap dengan identitas yang kuat, sehingga *brand* berperan efektif sebagai media publikasi dan pemasaran, serta sebagai identitas destinasi, juga sebagai ketahanan nasional. *Brand* destinasi menunjukkan identitas produk, secara kuat mengembangkan citra dan manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat maupun pengunjung melalui proses interaksi ‘layanan dan pengalaman’. Oleh karena itu, dalam pengembangan *brand identity* destinasi wisata, akan meliputi konten yang melibatkan banyak aspek, seperti; *values* dari *community, business etics, community organizing, net working, legal standing, regulation* (Bungin, 2015).

Merespon gejala pariwisata yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat lokal pedesaan, sebuah LSM yang bergerak dibidang lingkungan, yaitu Yayasan Wisnu membentuk Jaringan Ekowisata Desa (JED) yang terdiri atas empat desa, yaitu: (1) Banjar Kiadan; (2) Dukuh Sibetan; (3) Sekelompok orang di desa Tenganan; dan (4) Nusa Ceningan. JED memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan ekowisata desa, yaitu: 1) menekankan kepada peranan masyarakat desa di dalam menyusun perencanaan, dan pengelolaan ekowisata di wilayahnya; 2) manfaat ekonomi yang diperoleh didedikasikan kepada kegiatan sosial, budaya dan lingkungan masyarakat setempat; 3) transparansi dan demokratis sebagai dasar penguatan kerjasama antar desa JED; 4) aktivitas kegiatan JED didesain agar mampu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan lokal; dan 5) JED hadir dalam perannya sebagai jembatan pemahaman silang budaya melalui fasilitasi komunikasi dan

diskusi antar masyarakat lokal Bali dengan pengunjung.

Berdasarkan pada pemahaman dan konteks pembangunan serta pengembangan destinasi wisata, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, ekowisata desa berwawasan kearifan lokal, maka permasalahan dalam kajian ini adalah: “Bagaimana pola pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi Yayasan Wisnu dan JED, pada *enabling*, *empowering*, dan *autonomy* sesuai kriteria kecukupan ekowisata, mencakup konten identitas brand ekowisata desa berwawasan kearifan lokal.”

Tujuan kajian ini meliputi: (1) untuk memahami pola pemberdayaan masyarakat dalam membangun kesadaran dan kemampuan mengembangkan dan mengelola ekowisata desa berwawasan kearifan lokal; (2) memahami pola konstruksi sosial terhadap realitas desa wisata ekologis yang berbasis masyarakat dan berwawasan kearifan lokal.

Definisi ekowisata pertama kali diperkenalkan akhir tahun 1980-an oleh Ceballos-Lascurain. Terminologi digunakan untuk menggambarkan perjalanan ke lokasi-lokasi alami yang terpencil untuk tujuan menikmati dan mempelajari alam serta budaya masyarakat lokal (Mitchell, 1998; Furze, 1997, Wall & Ross, 1998). Ekowisata merupakan model pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Pengembangan ekowisata melalui desa wisata ekologis, dapat meredam laju industri pariwisata massal (*mass tourism*), yang potensial mendegradasi kualitas lingkungan. Fenomena industri pariwisata kerap mengeksploitasi potensi alam (lahan pertanian) sehingga berdampak pada alih fungsi lahan yang semakin meluas (Dipayana & Sunarta,

2015). Potensi munculnya perilaku hedonis, bergesernya nilai-nilai adat budaya lokal, dan minimnya pelibatan masyarakat (Urbanus dan Febianti, 2017).

Tipologi adalah studi atau klasifikasi sistematis dari berbagai tipe yang mempunyai karakteristik atau kualitas bersama. Tipologi ekowisata Bali berdasarkan aktor utama penggerak (*agent of change*) serta manajemen pengelolaan, meliputi: (1) Ekowisata yang digerakkan oleh investor (Ekowisata tipe Investor); (2) Ekowisata yang digerakkan oleh masyarakat (Ekowisata tipe Partisipatif); dan (3) Ekowisata yang digerakkan oleh pemerintah atau Ekowisata tipe Pemerintah (Arida, 2014).

Tujuan analisis ekowisata, *Pertama* adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana konsep ekowisata yang digunakan di lokasi pengembangan ekowisata memenuhi kecukupan kriteria ideal dalam literatur dan kebijakan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang. *Kedua*, yaitu untuk mengetahui implikasi pengembangan ekowisata dalam mempengaruhi citra ekowisata di lokasi pengembangan ekowisata. Berdasarkan kedua tujuan tersebut analisis kecukupan kriteria ekowisata dapat meliputi lima faktor, yaitu: (1) tujuan pengelolaan; (2) partisipasi masyarakat; (3) pengembangan ekonomi lokal; (4) produk wisata; dan (5) dampak minimal terhadap lingkungan (Pratiwi, 2008).

Desa wisata (*village tourism*) merupakan model ideal dalam mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, mendorong peran serta masyarakat lokal dalam mengelola destinasi wisata desa. Kelestarian lingkungan alam di wilayahnya, keaslian potensi budaya,

keunikan kehidupan masyarakat desa, pertanian rakyat, dan nilai-nilai keramahtamahan dalam kehidupan sehari-hari, penuh kedamaian, harmonis dengan suasana ekologisnya, merupakan daya tarik yang luar biasa. Dalam masyarakat pedesaan, nilai-nilai kehidupan sosio-kultural diwujudkan, dijaga, dipelihara sebagai pranata penting dan dikenal sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) atau *local indiginous*. Di dalam nilai-nilai kearifan lokal terkandung bentuk-bentuk mitigasi adaptif bagi masyarakat dalam mengelola kawasan ekologis mereka (Stone & Nyaupane, 2016).

Pemahaman tentang pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) pada dasarnya berkaitan erat dengan proses pembangunan pariwisata berkelanjutan. Artinya, dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata masyarakat lokal terlibat secara aktif karena memiliki pengetahuan dan dianggap sebagai syarat tercapainya pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pandangan ini didasarkan pada suatu hipotesis bahwa masyarakat setempat sudah mempunyai pengetahuan untuk berpartisipasi dalam mengelola sumberdaya yang mereka miliki. Partisipasi masyarakat hendaknya diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses mulai perencanaan sampai kepada pemanfaatan hasil-hasil pariwisata. Jadi, konsep pariwisata berbasis masyarakat adalah merupakan perubahan paradigma pembangunan dari pola *top-down planning* menjadi *bottom-up planning* (Pitana, 2002).

Kearifan lokal (*local wisdom/local indiginous*) lahir sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek,

atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, 2007). Dalam masyarakat pedesaan, nilai-nilai kehidupan sosio-kultural diwujudkan, dijaga, dipelihara sebagai pranata penting dan dikenal sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) atau *local indiginous*. Di dalam nilai-nilai kearifan lokal terkandung bentuk-bentuk mitigasi adaptif bagi masyarakat dalam mengelola kawasan ekologis mereka (Stone & Nyaupane, 2016).

Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu proses belajar yang berlangsung secara bertahap, yaitu: (1) Tahap penyadaran atau pembentukan perilaku menuju sadar dan peduli sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas diri; (2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan; dan (3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif menuju pada kemandirian (Sulistiyani, 2004). Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu: 1) pengembangan (*enabling*); 2) penguatan potensi atau daya (*empowering*); dan 3) terciptanya kemandirian (*autonomy*). Berdasarkan pemikiran ini, maka pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian (Winarni, 1998). Strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai arah dan kebijakan yang meliputi: 1) arah keberpihakan kepada masyarakat; 2)

arah pemantapan dan pendelegasian wewenang dalam pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat; dan 3) arah modernisasi melalui penajaman dan pemantapan struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal (Sedarmayanti, 2005).

Dalam pandangan Berger & Luckmann (1966), bahwa individu adalah produk dari konstruksi sosial terhadap realitas melalui proses institusi, legitimasi, dan sosialisasi. Dalam tiga proses ini berlangsung pula tiga proses simultan, yaitu: *eksternalisasi*, *legitimasi objektivitas*, dan *internalisasi*. Proses konstruksi sosial terhadap realitas berawal dari gagasan konstruktivis (pencipta ide, gagasan, dan nilai dan berjalan melalui proses sosial. Ide, gagasan, dan nilai diinternalisasi ke dalam diri individu dan keluarga (pribadi yang terkonstruksi). Eksternalisasi adalah proses pembentukan pola, aturan, atau peran di antara kelompok orang. Legitimasi dalam proses sosial objektivitas, memberi alasan yang rasional terhadap proses pelembagaan. Sedangkan proses internalisasi ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi konstruksi sosial terhadap realitas terhadap masyarakat. (Bungin, 2015).

Dalam mengonstruksi desa wisata ekologis, aspek utama yang diperhatikan adalah nilai kearifan lokal atau *local indigenosity* yang berkaitan dengan aspek sistem kosmologi Hindu di Bali (Pasek, 2015), yaitu "*Tri Hita Karana*" (Windia, 2011). Dalam konteks *tri hita karana*, wilayah *desa pakraman* terbagi atas tiga zone, yakni: (1) Zone kesucian yang disebut dengan "*Parahyangan*"; (2) Zone pemanfaatan terbatas disebut dengan "*Palemahan*"; dan (3) Zone pemanfaatan yang disebut dengan "*Pawongan*". Zona kesucian ini diperuntukkan bagi pendirian pura

(tempat peribadatan), perlindungan flora dan fauna sebagai kawasan konservasi kekayaan *desa pakraman*. Zona pemanfaatan terbatas merupakan zona transisi, dimana wisatawan bisa melintasi area ini untuk aktivitas ekowisata dengan sejumlah aturan. Zona pemanfaatan, yaitu kawasan yang digunakan sebagai lokasi sarana akomodasi dan fasilitas ekowisata untuk kepentingan wisatawan.

Kajian dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dari informan yang dipilih secara purposif yaitu penggagas desa wisata ekologis (Direktur Yayasan Wisnu Bali) yang berkedudukan di Kerobokan Denpasar Selatan dan Direktur Jaringan Ekowisata Desa (JED), sebagai subjek penelitian. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan (Oktober s.d. Desember 2016), untuk menggali latar belakang pembentukan jaringan ekowisata desa (JED). Bagaimana mereka memaknai (*meaning*) realitas nilai filosofi, prinsip, dan praktek ekowisata desa berbasis kearifan lokal. Triangulasi dilakukan kepada pelaku ekowisata di desa (*Banjar Kiadan*), sebagai ujung tombak yang memiliki pengalaman lapangan berinteraksi dengan pengunjung, memiliki tanggung jawab mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal positif dan mampu memuaskan para pengunjung. Wawancara dengan pengunjung asing yang ditemui secara insidental untuk memperoleh tanggapan atas penyelenggaraan desa wisata ekologis yang mereka rasakan selama melakukan kunjungan. Data sekunder dihimpun untuk mengetahui proses-proses pengembangan ekowisata desa yang melibatkan *stakeholder*, seperti pemerintah desa adat/dinas, pemerintah

daerah, akademisi, pemuda, dan penduduk lokal.

Hasil dan Pembahasan

Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku Peduli Ekowisata (*Enabling*)

Pada tahap penyadaran masyarakat desa pentingnya kesadaran membangun pariwisata bagi masyarakat dan lingkungan, Yayasan Wisnu dan JED secara kreatif mengajak peserta diklat berjalan-jalan ke lokasi *mass tourism* di Denpasar Selatan (Kuta) untuk melihat sendiri siapa pelaku industri pariwisata yang gemerlap itu. Pendamping menanyakan kepada peserta diklat bagaimana mereka melihat pariwisata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Direktur Yayasan Wisnu (2016), dialog yang dilakukan dengan masyarakat, sebagai berikut:

“...bayangan anda pariwisata seperti apa? Jawabannya, pariwisata ya, seperti “kuta”lah, ada bahasanya pariwisata sama dengan investor, pariwisata sama dengan hotel dan restoran begitu, kami ajak jalan-jalan, pertanyaannya sampai pada kalkulasi kalau begini model pariwisata apa yang Anda raih. Kami ajak untuk mencoba menghitung-hitung, air gimana, tanah, transport gimana, pembagian keuntungan, dampak lingkungan, dampak budaya. Kami diskusikan, akhirnya mereka mulai paham. Kami runut *supply chain*-nya, akhirnya mereka paham konstelasi yang ada. Inilah proses-proses penyadaran untuk memahami konstelasi siapa mendapatkan apa di ruang mereka.”

Secara ideal tujuan pengembangan ekowisata adalah pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung usaha konservasi melalui perlindungan, menjaga keberlanjutan sumberdaya alam yang merupakan aset wisatanya. Pemahaman mengenai pelestarian alam sebagai tujuan

pengelolaan ekowisata oleh pihak Yayasan Wisnu dan menjadi komitmen pengelola JED serta komunitas adalah lebih dari sekedar tujuan ritual, sebagaimana dikatakan Direktur Yayasan Wisnu (2016), berikut ini:

“...pelestarian alam, lebih dari pada pengamanan bahan-bahan ritual kami, karena kami juga bergerak dari keanekaragaman hayati, maka keamanan kami pada *biosafety*, keamanan plasma nuftah, pengamanan *genetic* juga *resources* alamiah, mitigasinya harus detail bahwa dalam masyarakat sudah ada upaya secara ritual seperti apa, begitu juga secara sosial kemasyarakatan seperti apa, masyarakat sebenarnya sudah mengetahui tinggal mengasah pemahaman yang lebih hakiki upaya untuk mengonservasi.”

Berdasarkan paparan di atas nampak jelas bahwa tujuan pengelolaan ekowisata desa adalah untuk tujuan konservasi sumberdaya alam dan budaya (sesuai kriteria kecukupan *pertama* ekowisata), melalui program pemberdayaan masyarakat, peningkatan *capacity building*, dan *community organizing* dalam penyelenggaraan ekowisata di desa masing-masing.

JED memprakarsai penyusunan tata ruang wilayah, mitigasi adaptif, dan zonasi pemanfaatan ruang. Dalam mengonstruksi desa wisata ekologis, aspek utama yang diperhatikan adalah nilai kearifan lokal atau *local indigenosity* yang berkaitan dengan aspek sistem kosmologi Bali dengan konsep ‘*Tri Hita Karana*’. Pentingnya untuk menerapkan sistem kosmologi Bali dalam pengembangan desa wisata ekologis dinyatakan oleh Direktur Yayasan Wisnu (2016), yaitu:

“...kami meyakini betul bahwa sistem kosmologi Bali begitu berkaitan dengan konsepsi *believe* dan bagaimana kita men-*treatment* diri kita dan lingkungan. Kalau *awig-awig* desa kita itu kan ada yang tertulis dan tidak tertulis, tapi

setelah kita mengajak mereka melihat, memaknai, memahami apa yang mereka miliki, mereka menjadi sadar untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, secara individu, sosial, termasuk dalam praktika desa wisata ekologis.”

Dalam konteks *Tri Hita Karana*, wilayah *desa pakraman* terbagi atas tiga zone: (1) Zone kesucian disebut dengan “*Parahyangan*”; (2) Zone pemanfaatan terbatas yang disebut dengan “*Palemahan*”; dan (3) Zone pemanfaatan disebut dengan “*Pawongan*”. Zona kesucian diperuntukkan bagi pendirian pura, perlindungan flora dan fauna sebagai kawasan konservasi kekayaan desa *Pakraman*. Zona pemanfaatan terbatas merupakan zona transisi, dimana wisatawan bisa melintasi area ini untuk aktivitas ekowisata dengan sejumlah aturan. Zona pemanfaatan, yaitu kawasan yang digunakan sebagai lokasi sarana akomodasi dan fasilitas ekowisata untuk kepentingan wisatawan.

Tahap Transformasi Pengetahuan (*Empowering*)

Terkait dengan pelibatan masyarakat, Yayasan Wisnu dan JED mengatakan bahwa pihaknya tidak mau melibatkan masyarakat hanya secara artifisial, melainkan melakukan perencanaan yang matang mengenai apa yang tidak diketahui masyarakat, apa yang diketahui menurut masyarakat, dan apa yang seharusnya diketahui oleh masyarakat terkait ekowisata. Setelah adanya pemantapan materi pengetahuan ekowisata yang dibutuhkan, kemudian disiapkan media komunikasi, edukasi, sosialisasi yang kondusif dan efektif sesuai karakteristik masyarakat desa. Setelah proses penyadaran berjalan dengan baik, melibatkan kelembagaan masyarakat di desa, peningkatan

capacity building dan mengadakan proses *community organizing* mulai dari konsep mengajak mereka secara fisik dan rasional, bagaimana mengembangkan dan mengelola kegiatan ekowisata di desanya. Langkah pelibatan masyarakat tersebut disampaikan oleh Direktur Yayasan Wisnu (2016) sebagai berikut:

“...pelibatan masyarakat itu ada stratanya, kami prosesnya *community organizing* mulai dari konsep mengajak mereka secara fisik dan rasional, narasumber, bercerita (*story telling*) atau berkontribusi atas sejarah, eksistensi dan peran-perannya di komunitas, terus kami juga libatkan anak muda dari perspektif perempuan, nah dalam konteks-konteks tertentu dalam *capacity building* ada beberapa pembagian-pembagian tugas yang dibutuhkan misalnya jadi *local guide*, *order*, kuliner, *guest house* segala macam. Nah hal ini kami yakin betul bahwa fungsi-fungsi tertentu tidak bisa di-*handle* oleh semua orang, jadi peran apa, siapa yang mampu mereka lakukan ya harus menduduki posisi ini, tapi dukungan kegiatan ini adalah diinstitusikan masuk ke dalam kelembagaan. Jadi ini menjadi milik mereka, jadi mereka terlibat atau tidak terlibat, mereka justru adalah pemilik.”

Pelibatan masyarakat desa dalam pengembangan ekowisata sangat urgen dan harus hati-hati agar tidak terjadi pelibatan artifisial, selain juga harus menjaga agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat memicu kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang mengakibatkan kontra produktif dengan tujuan pengembangan ekowisata. Berdasarkan informasi di atas dapat dipahami bahwa pelibatan masyarakat di lokasi studi sudah dilaksanakan sehingga sudah sesuai dengan unsur *kedua* dari kriteria kecukupan ekowisata.

Secara ekonomis sudah diciptakan atau dikembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat membuka

kesempatan kerja, seperti misalnya; *local guide*, tukang masak/kuliner, pentas seni, *homestay* atau *guest-house*, *coffeepark*. Instrumen-instrumen ekonomis ini menggerakkan aliran pendapatan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sesuai kapasitas dan *skill*-nya, serta penerimaan komunitas untuk pembiayaan kegiatan komunal yang bersifat kolektif. Konteks ini sebagaimana dikatakan Direktur Yayasan Wisnu (2016), sebagai berikut:

“...kami menjadikan desa mereka destinasi, maka secara ekonomis sudah di-*create* kegiatan-kegiatan kesempatan kerja seperti *local guide*, tukang masak, pentas seni, *homestay* itu kami sudah menciptakan lapangan kerja. Kalau ada seperti kopi organik yang dikemas mereka, itu ada pengembangan produk souvenir berupa kemasan kopi organik Kiadan Pelaga, tapi kemudian pengembangan produk kopi ini kami tarik pada proses yang lebih besar yang nantinya juga komunitas ini mempunyai akses sebagai pemegang saham dari usaha yang dibangun. Jadi konsepsi sebenarnya, kalau kita lihat sebagai *opportunity* dari komoditas yang ada itu sebenarnya mereka sangat terbuka untuk bisa melihat dan berkoordinasi dengan JED, misalnya ada tamu, *sense of creativity*, ada dia yang harus menjemput bola, tapi kalau kami men-*drill* mereka terus kan tidak membangun kreativitas. Kami sadar bahwa mereka sudah punya kemauan kami pupuk sedikit sudah bisa bergerak, kami memakai model pendidikan orang dewasa, dengan menumbuhkan partisipasi, kreativitas dan inovasi sesuai potensi, peluang yang tersedia dan terbuka.”

Fokus pada pengembangan ekonomi lokal merupakan misi utama bagi Yayasan Wisnu dan JED dalam mengembangkan ekowisata desa. Sebab pemahaman terhadap pengembangan ekowisata tidak sebatas menjadikan penduduk lokal hanya

sebagai objek semata, yang kemudian minta dibelaskasihani, menghimbau pelaku pariwisata untuk peduli kepada kemiskinan mereka, tentu tidak demikian. Berdasarkan informasi di atas dapat dipahami bahwa pengembangan ekonomi masyarakat di lokasi studi sudah dilaksanakan sehingga sudah sesuai dengan unsur *ketiga* dari kriteria kecukupan ekowisata.

Tahap Terbentuk Inisiatif dan Kemampuan Inovatif menuju Kemandirian (*Autonomy*)

Direktur Yayasan Wisnu (2016) mengungkapkan pandangan beliau dalam mengembangkan ekowisata desa (dalam konteks produk dan proses) sebagai berikut:

“...konsep kami dari awal mengembangkan ekowisata desa itu dari dua jalur, dari (1) jasa *ecotourism*/jasa lingkungan, sosio-kultural yang mereka emban di desa, dan juga (2) komoditi sendiri. Di komoditi sendiri adalah kami ingin mengembangkan konsepsi kopi yang namanya *coffeepark*, dari kebun kopi yang stigmatismenya, petani kopi itu ya seperti itu, petani yang anaknya tidak bangga padahal pohon kopi itu adalah pohon yang sangat *magical* sekali, bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati dari berbagai level kalangan, tukang kebun sampai ‘raja’ yang paling hebat, politisi yang hebat. Mereka semua menyukai kopi.”

Dari ungkapan di atas sangat jelas kelihatan bahwa ekowisata desa telah memiliki landasan ideal pemikiran tentang pengembangan produk ekowisata, yang mengandung makna pendidikan dimulai dari edukasi, sosialisasi, *training* untuk pengelola serta komunitasnya tentang mengkreasi penyelenggaraan ekowisata yang ideal, walaupun disadari diperlukan proses yang berkesinambungan sebagai hakekat proses pembelajaran tiada henti. Dalam

konteks ini, ada sesuatu makna yang terselip, dan sesungguhnya sangat urgen, substantif bagi eksistensi ekowisata. Artinya, produk ekowisata tidak dimaknai hanya sebagai alat pemuas kebutuhan pengunjung semata, tetapi yang jauh lebih mendasar bahwa produk ekowisata desa itu adalah manifestasi, simbolisasi, karakterisasi, ekspresi dari sebuah nilai yang menjadi inti keyakinan penduduk setempat (*hosts*), dimana nilai-nilai (*values*) ini kemudian menyatu secara totalitas dalam aktivitas ekowisata desa.

Ada proses saling memberi dan menerima, ada proses interpretasi, saling memahami, saling mengapresiasi, saling membangun kecintaan, saling memiliki kepedulian yang tinggi terhadap alam dan budaya tentunya. Pada konteks ini makna ideal dari pengembangan produk ekowisata desa sudah sangat terpenuhi, sebagaimana yang ungkapkan Direktur Yayasan Wisnu (2016) berikut ini:

“...kami sengaja mengundang temen-temen dan turis asing yang kami datangkan, kami katakan interaksi dan pertemuan itu sebagai *sharing knowledge*, sebenarnya bukan seperti *host and guest*, tetapi dia merasa ada sebuah *linking attitude* dari sisi mereka bertanya kita menjawab dan sebaliknya. Dalam konteks mereka saling bertanya, tetapi kejujuran menjadi sangat penting, kalau tidak bisa katakanlah tidak bisa, tanyakan kembali minta kepada mereka kalau mereka ada informasi, karena yang datang itu jangan anda anggap tidak membaca, tidak tahu, tidak memahami, tidak mempunyai *interest*. Jadi ini penting karena mereka sudah belajar sebelumnya, kadang-kadang yang datang kesana ahli kopi, jadi kita pura-pura hebat tapi ternyata yang kita ajak lebih hebat. itulah menjadi modal besar anda, kejujuran menjadi sangat penting sehingga anda tidak menjual kebohongan dalam konteks komunikasi dan menyadari penghargaan terhadap tamu.”

Berdasarkan informasi di atas dapat dipahami pengembangan produk ekowisata desa berbasis potensi dan wawasan kearifan lokal di lokasi studi sudah dilaksanakan sehingga sudah sesuai dengan unsur *keempat* dari kriteria kecukupan ekowisata.

Antisipasi terhadap dampak negatif yang timbul dari pengembangan produk dan atraksi ekowisata, Direktur JED (2016) mengatakan:

“...Dalam perspektif ideologis kita amankan. Kita merevitalisasi konsepsi dan konstelasi kehidupan masyarakat, nilai, *way of life* yang hidup di masyarakat, sekarang pertahankan dan kembangkan kemanfaatannya dengan cara-cara kreatif, inovatif, nilai-nilai substantifnya lestari dan berkelanjutan.”

Jadi makna untuk meminimalisasi dampak negatif pada lingkungan tidak sebatas *ansich* diukur pada parameter kuantitatif saja, tetapi lebih mendalam lagi yaitu mengantisipasi agar tidak terjadi pergeseran *mindset* pelaku ekowisata dari nilai-nilai, komitmen untuk menjaga kelestarian alam dan budaya, dijaga bersama antara penyedia layanan ekowisata desa dengan pengunjung, menjaga keberlanjutan budaya interaksi *linkage attitude* saling memberi, menjaga kepedulian lingkungan. Berdasarkan informasi di atas dapat dipahami bahwa minimalisasi dampak lingkungan ekowisata desa berbasis potensi dan wawasan kearifan lokal di lokasi studi sudah dilaksanakan sehingga sudah sesuai dengan unsur *kelima* dari kriteria kecukupan ekowisata.

Pembangunan ekowisata desa di Bali tidak lepas dari tatanan penyelenggaraan *desa pakraman*, sehingga pariwisata yang dihadirkan tidak tercabut dari akar sosio-kultural masyarakat Bali. Sistem kosmologi Bali dengan konsep *Tri Hita Karana*

dengan pemilahan atau zonasi wilayah tata ruang desa yang disebut *Tri Mandala*, yakni: (1) hubungan manusia dengan Sang Pencipta disebut *parahyangan*; (2) hubungan manusia dengan lingkungan disebut *palemahan*; dan (3) hubungan manusia dengan manusia disebut *pawongan*. Sistem kosmologi Bali merupakan pola dasar filosofi yang diimplementasikan ke dalam konsep fisik *Tri Mandala* penjabaran dari konsep filosofi *Tri Hita Karana*, merupakan dasar kesadaran moral dan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat desa dalam mengembangkan ekowisata desa, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam *awig-awig* (peraturan) *Desa Pakraman*. Pola pengembangan ekowisata desa mengikuti “Pola Serba Tiga” (*Tri ning Tri*).

Pola konstruksi sosial meliputi tiga aspek utama, yaitu; eksternalisasi, legitmasi, dan internalisasi. Proses eksternalisasi ini berjalan dalam waktu yang relatif lama, setiap desa didorong untuk mampu mengidentifikasi potensi dan keunikan, otentisitas, serta kekhasan produk ekowisata, sekecil apapun. Sesuai proses pemberdayaan yang diinisiasi, diedukasi, dan dimotivasi oleh Yayasan Wisnu dan JED melalui diklat *capacity building*, *community organizing*, *skill* layanan ekowisata desa, maka masyarakat desa di wilayah JED semakin memahami potensi dan identitas ekowisata desa. Dengan demikian, maka semakin tergugah kesadaran diri mengembangkan produk ekowisata desa berwawasan kearifan lokal.

Tahap legitmasi, merupakan proses pelembagaan (*institutionalized*) nilai-nilai sosio-kultural dalam masyarakat. Legitmasi memberi alasan yang rasional terhadap pelembagaan nilai-nilai sosio-kultural yang

disampaikan kepada masyarakat. Pada ekowisata JED, dalam konteks tipologi ekowisata, merupakan ekowisata tipe masyarakat, maka dalam pengembangan dan pengelolaannya menggunakan pranata tradisional *desa pakraman*. *Desa* ataupun *banjar pakraman* dengan nilai-nilai kearifan lokal merupakan instrumen bagi pihak pemegang otoritas pengelolaan ekowisata desa. Instrumen *desa pakraman* ini secara efektif digunakan untuk mengakumulasi, mengkoordinasikan, dan mensinergikan modal-modal internal lainnya. Dengan demikian, apabila masyarakat lokal semakin kaya dan kuat konektivitas dengan nilai-nilai kearifan lokal ekowisata *desa pakraman*, maka semakin meningkat kemampuan *sharing knowledge* tentang produk, atraksi dan jasa ekowisata.

Tahap internalisasi merupakan sebuah proses dimana produk sosial dapat membuat orang lain menjadi sebagian daripada produk sosial itu. Internalisasi adalah proses dimana suatu produk sosial menjadi diri sendiri. Dengan demikian, wisatawan yang berkunjung ke destinasi ekowisata dimaknai dan dipahami sebagai sebagian dari produk ekowisata itu sendiri. Hal ini karena ekowisata juga dikenal sebagai aktivitas pariwisata minat khusus (*special interest tourism*) yang berbeda dengan *mass tourism*.

Keberhasilan proses internalisasi meningkatkan kemampuan masyarakat dalam *sharing knowledge* dan menciptakan *linkage attitude* antara masyarakat (*Host*) dan pengunjung (*Guest*) secara harmonis. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh, maka keberhasilan konstruksi sosial ekowisata desa berbasis kearifan lokal ditandai semakin kuatnya kemampuan *sharing knowledge* dan *linkage attitude*

di antara masyarakat lokal dengan pengunjung.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa pengembangan ekowisata desa berbasis masyarakat berwawasan kearifan lokal, diwujudkan melalui pemberdayaan yang meliputi tahap; *enabling*, *empowering*, dan *autonomy*, serta memenuhi ketentuan kriteria kecukupan ekowisata secara ideal. Proses konstruksi sosial terhadap realitas pengembangan ekowisata mengikuti tiga tahap teori konstruksi sosial, yaitu tahap eksternalisasi, legitimasi dan internalisasi. Dengan demikian, bahwa: (1) Pola pendampingan yang dikembangkan Yayasan Wisnu dan JED semakin tergugah kesadaran diri masyarakat lokal untuk mengembangk an produk ekowisata desa berwawasan kearifan lokal; (2) Apabila masyarakat lokal semakin kaya dan kuat konektivitas dengan nilai-nilai kearifan lokal ekowisata *desa pakraman*, maka semakin meningkat kemampuan *sharing knowledge* tentang produk, atraksi dan jasa ekowisata; (3) Keberhasilan konstruksi sosial ekowisata desa berbasis kearifan lokal ditandai semakin kuatnya kemampuan *sharing knowledge* dan *linkage attitude* di antara masyarakat lokal dengan pengunjung.

Daftar Pustaka

- Arida, I N. 2016. *Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali*, Denpasar: Pustaka Larasan bekerjasama dengan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.
- Berger, P.L. & Luckmann, T. 1966. *The Social Construction of Reality. A treatise in the Sociology of Knowledge*, New York: Anchor Books
- Bungin, B. 2015. *Komunikasi Pariwisata, Tourism Communication, Pemasaran dan Brand Destinasi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Damanik, J. 2013. *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Dipayana, A. & Sunarta, I N. 2015. Dampak Pariwisata Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung (Studi Sosial Budaya), *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 3(2), ISSN. 2338-8811.
- Furze, B., De Lacy, T., & Birckhead, J. 1997. *Culture, conservation and biodiversity*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Mitchell, E. G. R. 1998. *Community Integration in Ecotourism: A Comparative Case Study of Two Communities in Peru* [Thesis]. The University of Guelph, Canada.
- Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Sosial UGM. 1997. *Wisata Minat Khusus: Laporan Ringkas Studi Rencana Pengembangan Wisata Minat Khusus*. Yogyakarta: PAU UGM.
- Pasek, P. 2015. Kosmologi Hindu Bali, balicircle.blogspot.co.id/2015/05/kosmologi-hindu-bali.html.
- Pitana, I.G. 2002. *Community Management Dalam Pembangunan Pariwisata*, Majalah Ilmiah Pariwisata, *Analisis Pariwisata*, Vol. 2 No. 2, Denpasar: Universitas Udayana.

- Pratiwi, S. 2008. *Model Pengembangan Institusi Ekowisata untuk Konflik di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak*, Desertasi, Bogor: IPB.
- Ridwan, N.A. 2007. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*. Vol. 5 (1), 27-38.
- Sedarmayanti. 2005. *Membangun Kebudayaan dan Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*. Bandung: Mandar Maju.
- Stone, M.T. & Nyaupane, G.P. 2016. Ecotourism influence on community needs and the functions of protected areas: a systems thinking approach, *Journal of Ecotourism*, 16(3), 222-246, Doi: 10.1080/14724049.2016.1221959
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Pola - Pola Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Urbanus, I N. & Febianti. 2017. Analisis dampak perkembangan pariwisata terhadap perilaku konsumtif masyarakat wilayah Bali Selatan, *Jurnal Kepariwisata dan Hospitality*, 1(2), 118-133.
- Wall G. & Ross, S. 1998. *Ecotourism towards congruence between theory and practice*. Waterloo, Canada: Faculty of Environmental Studies, University of Waterloo.
- Winarni, T. 1998. *Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21, Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Yogyakarta: Fisipol UGM, Aditya Media.
- Windia, W., Dewi, & Ratna K. 2011. *Tri Hita Karana*, Denpasar: Udayana University Press.